KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWTkarena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

KAMBANG, 20 JANUARI 2021

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, M.A

NIP. 19841008 200312 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI			dst
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1.	Latar Belakang	
	1.2.	Dasar Hukum	
	1.3.	Maksud dan Tujuan	
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN **DINAS/BADAN**		
	2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	
	2.2	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
BAB V	PENUTUP		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Camat Lengayang Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Camat Lengayang Anggaran Tahun disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor….. Tahun…. 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor …. Tahun…. 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor….Tahun… 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor…..Tahun…. 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor ….. Tahun…. 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor…… Tahun….. tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun..... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun .....2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor...Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKPJ Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

1.3.2Tujuan

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KANTOR CAMAT LENGAYANG

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utamadan target capaian selama satu tahun Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Persen	82%	80	
2.	Jumlah Nagari berkinerja baik	Nagari	9	9	
3.	Nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Nilai	BB	B	

2.2. Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lengayang.

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/ Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	Jumlah TPQ X100% Jumlah Mesjid	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Pembinaan kelembagaan KAN	Jumlah KAN yang dibina	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Trantib

TABEL 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
KANTOR CAMAT LENGAYNG Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang**	Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	BB(75)	97%	80%	Pelayanan administrasi perkantoran	152.797.500	145.044.707	95%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.371.000	97.285.000	99%
2	**Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Masyarakat Tiap-tiap Kepala Seksi.**	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Pablik	80	75%	80%	Program Peningatan Pelayanan Bidang Perizinan.	0	0	0%
						Program perencanaan Pembangunan Daerah.	14.150.000	14.150.000	100%
						Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan.	0	0	0%
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	6.187.500	6.187.500	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerinthan Nagari dalam Adminirasi Pengelolaan Keuangan nagari**	Jumlah Nagari yang Menyelesaikan Admisnisrasi Keuangan Nagari dengan tertib dan Benar dan tepat Waktu.	80	100%	80%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	2.750.000	2.750.000	100%
4	**Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan**	Mesjid yang memiliki TPQ aktif	80	75	94%	Program peningkatan IMTAQ	57.325.000	57.325.000	100%
5	**Meningkatkan Kehidiupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Budaya dan Agma.**	Pembinaan kelembagaan KAN	80%	50%	63%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0%
						Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat dan Nagari.	33.287.500	32.802.500	99%
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	7.487.500	7.487.500	100%
						J U M L A H	372.356.000	363.032.207	97%

1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
KANTOR CAMAT LENGAYNG Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang**	Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	BB(75)	97%	80%	Pelayanan administrasi perkantoran	152.797.500	145.044.707	95%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.371.000	97.285.000	99%
3	**Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Masyarakat Tiap-tiap Kepala Seksi.**	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Pablik	80	75%	80%	Program Peningatan Pelayanan Bidang Perizinan.	0	0	0%
						Program perencanaan Pembangunan Daerah.	14.150.000	14.150.000	100%
						Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan.	0	0	0%
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	6.187.500	6.187.500	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerinthan Nagari dalam Adminirasi Pengelolaan Keuangan nagari	Jumlah Nagari yang Menyelesaikan Admisnisrasi Keuangan Nagari dengan tertib dan Benar dan tepat Waktu.	80	100%	80%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	2.750.000	2.750.000	100%
4	**Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan**	Mesjid yang memiliki TPQ aktif	80	75	94%	Program peningkatan IMTAQ	57.325.000	57.325.000	100%
5	**Meningkatkan Kehidiupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Budaya dan Agma.**	Pembinaan kelembagaan KAN	80%	50%	63%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0%
						Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat dan Nagari.	33.287.500	32.802.500	99%
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	7.487.500	7.487.500	100%
						J U M L A H	372.356.000	363.032.207	97%

A. PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT LENGAYANG ANGGARAN TAHUN 2020.

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)			
			ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
20. URUSAN OTONOMI						
	14. KECAMATAN LENGAYANG		372.356.000.-	**363.032.207.**	**9.323.793.**	**97,50.%**
	I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**152.797.500.**	**145.044.707.**	**7.642.446**	**94.93.%**
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.200.000.	6.545.207.	5.454.793.	54.54.%
	2	Penyediaan Jasa admministrasi keuangan	46.121.000.	46.120.000.	600.	99.99.%
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.459.500.	15.4589.500.	0	100. %
	5	Penyediaan alat tulis kantor	20.549.000.	20.541000.	8000.	99.96.%
	6	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	9.750.000.	9.165.000.	10.000.-	99.89.%
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik / pe nerangan bangunan kantor	4.951,000	4.698.600.	252.500.	94.90.%
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.500..000.	3.380.000.	1.120.000.-28	75.11.%
	9	Penyediaan makanan dan minuman	21.726.000.	21.445.000.	281.000.	98.71.%
	10	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6.480.000.	5.925.000.	555.000.	99.44.%
	11	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.836.000.	11.765.000.	71.000.	99.40.%
	II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASA RANA APARATUR**	**84.718.894.**	**95,288,650**		98.90.%
	1	Pengadaan Perlengkaapan gedung kantor	0	0	0	0
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.000.000	14.000.000	0	100%
	2	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	6.547.000.	6.547.000.	0	100%
	3	Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor.	32.900.000.	0.	0	0
	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.950.000..	1.950.000.	0	100%
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	42.974.000.	41.888.00..	1.080.000	97.03.%
	III	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	0	0		0
	1	Pelaksanaan Hari Besar Nasional	0	0	0	0
	2	Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya.	0	0	0	0
	IV	**Program Peningkatan Pembratasan penyakit masyarakat (pekat)**	7.487.500	7.487.500	**0**	100%
	1	Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	7.487.500	7.487.500	0	100%
	V	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat.**	**6.187.500.**	**6.187.500.**	**0**	100..%
	2	Fasilitasi dn Pembinaan Lingkungan Sehat/BBRGM.	6.187.500	6.187.500.	0	100..%
	VI	**Program Pembinaan Pengelolam Keuangan Desa/Nagari**	**2.750.000.**	**2.750.000**	**0**	**100.%**
		Pembinaan dan Pengawasan Adm Keuangan Pem, Nagari.	2.750.000	2.750.0000.	0	100.%
	VII	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.**	**0**	**0**	**0**	**0**

	1	Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat.	0	0	0	0
	IIIV	**PROGRAM Pemberdayaan Lembga Sosial Masyrakat dan Nagari.**	**33.287.500.**	**33.287.500.**	**485.000**	**98.54.%**
	1	PFasiitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masarakat.	24.475.000..	24.475.000..	485.000	93.01.%
	2	Memasyarakatkan Olah Raga di Desa dan Nagari.	8.812.500.	8.812.500.	0	100.%
	3	Pembinaan Lembaga Adat Aosial Budaya /KAN.	0	0	0	0
	IX	**PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah.**	**14.150.000.**	**14.150.000**	0	100.%
	1	KPenylenggaraan Musrenbang RKPD.	14.150.000.	14.150.000	0	100.%
	X	**PROGRAM Peningkatan Pelayann Pablik Bidang Perizinan.**	0	0	0	0
	5	Fasilitasi Penyelenggaraan FATEN.	0	0	0	0
	XI	**PROGRAM Peningkatan IMTAQ.**	**57.325.000.**	**57.325.000.**	**0**	100.%
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ.	50.000.000.	50.000.000.	0	100.%
	2	Pembinaan Didikan Subuh Tergiat.	2.750.000.	2.750.000.	0	100.%
	3	Fasilitai dan Pembinaan Keagamaan,	4,575.000.	4,575.000.	0	100.%

BAB III
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah KabupatenPesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat KabupatenPesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah KabupatenPesisir Selatan membuka

selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban BupatiPesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Kambang, 20 Januari 2021

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, M.A

NIP. 19841008 200312 1 003